

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang terjadi pada masa orde baru menciptakan dominasi pemerintah pusat terhadap daerah yang mematikan kamandirian daerah sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi di daerah disebabkan karena kurangnya keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Desentralisasi dapat dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah serta tersalurkannya pelayanan publik yang lebih baik, dikarenakan pemerintah daerah memiliki akses informasi yang lebih baik dalam menangani kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana di atur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggung jawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya pemerintah daerah. Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian di dalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat

memberdayakan potensi masing-masing daerah. Kebebasan pemerintah dalam merancang keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah. Dalam perencanaannya belanja daerah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), anggaran ini merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam tahun tertentu yang dirancang dan disetujui bersama dengan DPRD, APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah sering kali mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini disebabkan tidak seimbangannya penerimaan daerah dan dana belanja daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan. Dana Perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Sering kali dalam proporsi dalam alokasi umum lebih tinggi dari penerimaan daerah, bahkan di beberapa daerah sangat kekuarangan anggaran sehingga di berikan dana alokasi khusus. Hal ini menunjukkan masih tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Tujuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Wagner menyebutkan dalam suatu perekonomian apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Wagner dalam Mahyuddin, 2009), dimana analogi untuk Hukum Wagner ini adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan pembiayaan melalui penerimaan yang pada akhirnya pengeluaran pemerintah juga akan meningkat atau dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan mencerminkan besarnya dana pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan layanan jasa pemerintah.

Konsep tersebut didukung oleh Wagner sebagai berikut : “as per capital income rises in industrialising nation, their public sector will grow in relative importance”.

Teori tersebut didukung oleh Peacock dan Wiseman “bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar” (Mangko-Soebroto, 1993: 173). Wegner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Kota Kupang

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Dana Perimbangan (%)
1	2005	3,36	79,28
2	2006	5,62	90
3	2007	7,76	10,89
4	2008	7,13	3,47
5	2009	6,13	88,35
6	2010	5,05	5,89
7	2011	8,83	12,07
8	2012	7,52	26,76
9	2013	7,2	16,36
10	2014	6,98	11,15
11	2015	6,62	3,00
12	2016	6,74	32,3
13	2017	6,83	79,1

Sumber : BPS Provinsi NTT (Keuangan Setda Kota Kupang) tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi kota Kupang dari tahun 2005-2017. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kota Kupang tiga belas tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,83%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,36%. Dana perimbangan yang diterima kota Kupang dalam kurung waktu tiga belas tahun terakhir terus mengalami perkembangan yang fluktuatif juga . Dana perimbangan terbesar yang diterima kota kupang terjadi pada tahun 2009 sebesar 88,35%, sedangkan dana perimbangan terkecil yang diterima kota Kupang terjadi pada tahun 2006 sebesar 90%. Berdasarkan data sementara yang telah dikumpulkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa besarnya dana perimbangan yang diterima tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan kota Kupang, sedangkan berdasarkan dari uraian di awal dengan

adanya bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan ini sangat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi.

Tabel 1.2
Data Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Kota kupang

No	Tahun	PertumbuhanEkonomi (%)	PendapatanAsliDaerah (%)
1	2005	3,36	43,94
2	2006	5,62	38,42
3	2007	7,76	20,57
4	2008	7,13	9,02
5	2009	6,13	29,75
6	2010	5,05	7,78
7	2011	8,83	22,11
8	2012	7,52	39,88
9	2013	7,2	21,14
10	2014	6,98	40,01
11	2015	6,62	28,41
12	2016	6,74	13,98
13	2017	6,83	38,49

Sumber : BPS Provinsi NTT 2019(Keuangan Setda Kota Kupang)

Tabel diatas menunjukan Pendapatan Asli daerah Kota Kupang dalam kurung waktu tiga belas tahun terakhir memiliki terend yang positif karena terus mengalami peningkatan. Pendapatan Asli daerah terbesar yang diterima kota kupang terjadi pada tahun 2005 sebesar 43,94%, sedangkan Pendapatan asli daerah terkecil yang diterima kota Kupang terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,78%. Sedangkan presentasi perkembangan PendapatanAsli Daerah justru mengalami perkembangan yang fluktuatif, dapat dilihat bahwa besarnya PendapatanAsli Daerah yang diterima tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan di bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro, yaitu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang.